

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan melalui penerimaan PKB dan BBNKB. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan jumlah penduduk, laporan PDRB per kapita serta laporan penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur yang menerbitkan laporan jumlah penduduk, laporan PDRB per kapita serta laporan penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2013 sampai tahun 2014 secara lengkap yaitu sebanyak 60 kabupaten/ kota. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 21.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan sebagai variabel dependen. Kemandirian keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita sebagai variabel independen sedangkan penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel intervening (mediasi).

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel mediasi.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel mediasi.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang menjadikan penelitian ini jauh dari sempurna. Keterbatasan penelitian ini yaitu berdasarkan data sekunder yang diambil dari BPS dan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, tidak berdasarkan observasi secara langsung sehingga kurang dapat digali lebih dalam tentang kemandirian keuangan daerah.

5.3 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran peneliti antara lain :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah atau mengganti variabel-variabel intervening yang lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah seperti : pajak parkir, pajak hotel yang keduanya merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat
 - c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang beragam dan menggunakan faktor eksternal yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- A.A.N.B. Dwirandra. 2008. Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal Akuntansi*.
- Agustina, Oesi. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengolahan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011).
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Davey, K. 1989. *Keuangan Pemerintah Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ebit Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No. 1, Hal 15-29.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Edisi 6. Semarang : Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta : YKPN.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Nani C Mokoginta. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 1, Hal 685-694.
- Ni Nyoman, I Made, Dan Wirathi. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Perkapita Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010.
- Prabowo, P., Arwanto, A., Soemantri, D., Sukandar, E., Supriyadi, H., Parsudi, I., ... & Prodjosudjadi, W. (1999). A comparison of valsartan and captopril in

patients with essential hypertension in Indonesia. *International journal of clinical practice*, 53(4), 268-272.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suprianto, Edy. 2014. *Hukum Pajak Indonesia*. Semarang: Graha Ilmu.

Soeparmoko, 1986. *Keuangan Negara*. BPFE UGM, Yogyakarta : Rineka Cipta.

Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah

